

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK
COVID-19 DI SURALAGA, LOMBOK TIMUR (STUDI PADA
PEMULIHAN EKONOMI PEKERJA MIGRAN)**

***GOVERNMENT POLICY IN MANAGING THE IMPACT OF COVID-19 IN
SURALAGA, EAST LOMBOK (STUDY ON THE ECONOMIC RECOVERY
OF MIGRANT WORKERS)***

Saipul Hamdi^{1*}, Oryza Pneumatica Indrasari², Syarifuddin³, dan Moh Adiyat Hidayatullah⁴

^{1,2,3,4}Sosiologi Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Mataram, NTB
email: shamdi@unram.ac.id*

Diserahkan: 21/04/2022; Diperbaiki: 29/05/2022; Disetujui: 27/06/2022

DOI: 10.47441/jkp.v17i1.259

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memahami kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 terhadap ekonomi pekerja migran dan upaya pemulihannya. Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 ini agar tidak menimbulkan krisis yang berkepanjangan dan meminimalisir dampak-dampak di sektor lainnya, maka pemerintah membutuhkan suatu kebijakan pengamanan sosial untuk kestabilan ekonomi masyarakat, terutama bagi buruh migran. Untuk memahami lebih detail tentang kebijakan pemerintah dan implementasinya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model implementasinya dalam pemulihan ekonomi masyarakat khususnya kelompok pekerja migran Indonesia (PMI). Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober-Maret 2022) dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian sebanyak 30 orang (15 laki-laki dan 15 perempuan) terdiri dari pekerja migran, pemerintah desa, pemerintah daerah, LSM, dan penyalur TKI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Covid-19 berdampak besar pada melemahnya ekonomi masyarakat termasuk kelompok pekerja migran. Selain itu, pemerintah desa di kecamatan Suralaga yakni desa Surala, Paok Lombok dan Dasan Borok berhasil mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19 khususnya bagi kelompok pekerja migran Indonesia. Selain melanjutkan program pusat seperti pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan sembako, pemerintah desa di tiga desa tersebut membuat kebijakan khusus sebagai solusi atas persoalan ekonomi yang terjadi pada kelompok pekerja migran Indonesia yaitu memberi bantuan kepada PMI yang terkena musibah di negara tempat bekerja, memberikan akses ilegal kepada PMI selama Covid-19, pengembangan UMKM, bantuan pertanian, peternakan.

Kata Kunci: Kebijakan, Covid-19, Ekonomi, Buruh Migran, Suralaga

Abstract

This article aims to understand government policies in tackling the impact of the Covid-19 Pandemic on the economy of migrant workers and their recovery efforts. To overcome the impact of the Covid-19 pandemic so as not to cause a prolonged crisis and minimize the impacts in other sectors, the government needs a social security policy for the economic stability of the community, especially for migrant workers. To understand in more detail about government policies and their implementation, this study aims to explore the implementation model in the economic recovery of the

community, especially the Indonesian Migrant Workers (PMI) group. This research was conducted for 6 months (October-March 2022) using qualitative methods. Data was collected using participant observation techniques, in-depth interviews, FGDs, and documentation. There were 30 informants in the study (15 men and 15 women) consisting of migrant workers, village governments, local governments, NGOs, and migrant workers distributors. The results of this study indicate that Covid-19 has had a major impact on the weakening of the community's economy, including groups of migrant workers. In addition, the village governments in the Suralaga sub-district, namely the villages of Suralaga, Paok Lombok and Dasan Borok, have successfully implemented policies from the central government in order to mitigate the economic impact of Covid-19, especially for groups of Indonesian migrant workers. In addition to continuing central programs such as providing BLT (Direct Cash Assistance) and basic necessities, the village governments in these three villages made special policies as a solution to the economic problems that occurred to groups of Indonesian migrant workers, namely providing assistance to PMIs who were affected by disasters in their countries of work, providing illegal access to PMI during Covid-19, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) development, agricultural assistance, and livestock.

Keywords: Policy, Covid-19, Economy, Migrant Workers, Suralaga

PENDAHULUAN

Infeksi virus yang bernama Covid-19 ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 (Bodrud-Doza *et al.* 2020; Hamdi, 2022). Virus ini menyebar dengan cepat dan menyebar ke wilayah bagian lain dari China dan mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia pada awal Maret 2020. Pandemi virus Corona membawa dampak bagi berbagai sektor kehidupan seperti sosial ekonomi. Penyebaran Covid 19 yang semakin meluas akan memperlama periode jatuhnya perekonomian Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Estro 2020; Maritz *et al.* 2020; Bodrud-Doza *et al.* 2020). Dengan adanya pandemi Covid-19 membawa dampak yang besar terkait dengan melemahnya perekonomian tenaga kerja di Indonesia, akibatnya mau tidak mau beberapa perusahaan mengurangi jumlah pekerja mereka sehingga terjadi PHK sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit.

Salah satu kelompok rentan yang terdampak pandemi Covid-19 ini adalah pekerja migran, akibat dampak pandemi Covid-19 karena mengharuskan mereka untuk menyelesaikan kontrak kerjanya dan kembali ke negara asal. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan sosial pekerja migran dibandingkan saat mereka masih bekerja di luar negeri (Wijayanti *et al.* 2019). Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di berbagai negara terus memberi kontribusi positif bagi devisa negara dan pengembangan ekonomi mereka dan keluarganya. Terlepas dari kenyataan bahwa pekerja migran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal dan bahkan nasional (Jalaludin & Suriadi 2019;) akan tetapi di masa pandemi Covid-19 ini sangat penting untuk memperhatikan perekonomian para pekerja migran terutama oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Pengalaman dan keterampilan yang diperoleh para pekerja migran selama ini seharusnya menjadi modal utama bagi perkembangan perekonomian Indonesia, namun hal tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal di Indonesia, bahkan berujung pada meningkatnya angka pengangguran baru. International Labor Organization (2015) juga menekankan pentingnya investasi buruh migran yang salah satu bentuknya adalah usaha kecil. Hal tersebut ditujukan untuk mengatasi *hazardous migration cycle* (siklus migrasi yang berisiko), di mana setelah penghasilan yang dikumpulkan habis para mantan pekerja migran berangkat lagi ke luar negeri untuk bekerja. Padahal, dengan penghasilan mereka yang cukup tinggi mereka bisa membangun bisnis di negeri sendiri atau berinvestasi pada pendidikan (Dewi 2020).

Provinsi NTB masuk dalam kategori daerah penyuplai terbesar buruh migran ke luar negeri. Pada tahun 2019 tercatat jumlah PMI berada di posisi keempat yaitu 30.706 orang (Haerudin 2019). Berdasarkan data BNP2MI periode Juli 2019 jumlah buruh migran di Lombok Timur mencapai 1.046 orang. Angka ini merupakan jumlah tertinggi di NTB, dan sekaligus menempatkan Lombok timur menjadi ketiga besar penyumbang buruh migran di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan-kebijakan pemerintah serta implementasinya di lapangan dan pengaruhnya terhadap ekonomi buruh migran di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini sangat penting untuk melihat kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah serta implementasinya di lapangan untuk pemulihan perekonomian buruh migran. Beberapa penelitian telah meneliti tentang kebijakan pemerintah menanggulangi Covid-19 diantaranya Pangaribuan (2021) yang membahas tentang kebijakan pemerintah DKI Jakarta menangani pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam penanganan Covid 19 di Jakarta. Anggraeni *et al.* (2021) membahas tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 menunjukkan kebijakan pemerintah berupa pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan, intensif pajak bagi UMKM, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, Perluasan Pembiayaan Model Kerja UMKM, Penyediaan Penyangga Produk. Jalaludin dan Suriadi (2019) membahas tentang analisis kebijakan pengelolaan buruh migran menunjukkan bahwa kebijakan daerah terkait penanganan pekerja migran baik sebelum, Qawiyuriyyal (2020) Pekerja Migran Indonesia Di Tengah pandemi Covid-19 menunjukkan keberpihakan kepada PMI meskipun dalam narasi beritanya BBC News Indonesia hampir selalu menyajikan tiga kelompok narasumber yang berbeda yakni PMI, pemerintah, dan organisasi pemerhati PMI.

Dari beberapa kajian yang berkaitan tentang kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 terhadap pemulihan perekonomian buruh migran di masa pandemi Covid-19 masih kurang menerima perhatian banyak pihak, hal ini terlihat berdasarkan minimnya kajian atau riset yg menelaah secara khusus tentang bagaimana kebijakan pemerintah terhadap perekonomian buruh migran di masa pandemi Covid-19. Dari penelitian terdahulu lebih sering menekankan dampak pandemi Covid-19 pada bidang ekonomi membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi kasus ekonomi yang dihadapi masyarakat secara general dan secara khusus cenderung melihat bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku usaha, industri, dan pariwisata. Melihat tulisan-tulisan di atas tidak ada yang membahas secara spesifik tentang kebijakan pemerintah khususnya pemerintah desa dalam membantu ekonomi kelompok pekerja migran sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dan dapat membatasi gap dari literatur sebelumnya yang hanya mengkaji kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Oleh karenanya, kajian mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi covid-19 terhadap ekonomi buruh migran dirasa perlu dilakukan agar menunjang keilmuan berkaitan mengenai kebijakan pemerintah menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian buruh migran di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Sedangkan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, studi kasus adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut serta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik (Susilo *et al.* 2011). Desain ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kebijakan pemerintah desa dalam menangani dampak pandemi Covid-19 terhadap kelompok pekerja migran Indonesia di

Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Penelitian ini juga menerapkan triangulasi sumber data dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data (Creswell dan Miller 2010).

Penelitian ini dilakukan di Desa Suralaga, Desa Paok Lombok, dan Desa Dasan Borok yang berada di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Tiga desa tersebut merupakan desa asal pekerja migran yang merasakan dampak perekonomian akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober-Maret 2022). Penelitian mengambil sampel dari kalangan pemerintah daerah, pemerintah desa, LSM, 30 pekerja migran. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui Wawancara mendalam, Observasi, FGD dan Dokumentasi. Teknik analisa dilakukan melalui tiga tahapan yakni reduksi data, display data, verifikasi dan kesimpulan (Farid 1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis kebijakan khusus pemerintah Desa dan implementasinya terhadap pemulihan ekonomi PMI pada masa pandemi Covid-19 di Desa Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Dengan demikian untuk memudahkan peneliti dalam menggambarkan penerapan program tersebut maka dapat dilihat dari variabel-variabel berikut ini: 1) Sasaran kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Komunikasi; 4) Karakter agen pelaksana; 5) Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik; serta 6) Disposisi.

Sasaran Kebijakan (ukuran dasar dan tujuan kebijakan)

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dipakai oleh para pelaksana kebijakan. Dengan adanya ketegasan standar dan sasaran kebijakan, maka implementor akan lebih mudah menentukan atau membuat strategi untuk mengarahkan bawahan dan mengoptimalkan fasilitas yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini sasaran kebijakannya yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari tiga desa di kecamatan Suralaga yakni desa Suralaga, Paok Lombok dan Dasan Borok. PMI menjadi target dan sasaran karena mereka bagian dari kelompok rentan yang membutuhkan penanganan khusus.

Sumber Daya (SDM dan Finansial)

Sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan sangat penting dalam menjalankan kebijakan. Setiap tahap implementasi memerlukan adanya sumber daya yang memadai, terutama sumber daya manusia yang merupakan sumber daya paling penting. Karena pada dasarnya manusia merupakan subjek dan objek dari sebuah kebijakan itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mempermudah jalannya suatu program ke arah keberhasilannya.

Ketiga desa menunjukkan bahwa mereka memiliki SDM yang cukup baik dalam mengimplementasikan program. Pendataan kelompok PMI sebagai kelompok rentan menjadi prioritas karena kepala desa di tiga desa ini adalah mantan PMI yang pernah bekerja di Malaysia dan Arab Saudi. Pengetahuan mereka tentang kebutuhan-kebutuhan PMI pasca pulang di kampung membantu suksesnya program kebijakan pemerintah. Sumber daya finansial juga cukup karena anggaran desa yang dialokasikan untuk recovery ekonomi masyarakat termasuk pekerja migran. Ketiga desa tersebut mengikuti instruksi pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa sampai 40%.

Komunikasi (komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan)

Komunikasi diperlukan agar terciptanya konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan, sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan

kebijakan tersebut. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan kebijakan atau program. Komunikasi yang terlihat dalam implementasi kebijakan khusus pemulihan ekonomi pekerja migran ini terlihat dari setiap kali proses pengambilan keputusan desa selalu mengedepankan muswarah dengan lembaga lembaga terkait. Seperti yang di paparkan oleh kepala Desa Dasan Borok Angga Sarimah melalui laman harian 27 Sinar News.com: “Pendataan penerima dilakukan mulai RT/RW dan diverifikasi melalui musyawarah desa khusus agar benar-benar tepat sasaran, obyektif, transparan”. Komunikasi juga dijalankan hingga ke masyarakat tidak mampu khususnya pekerja migran. Karena memang pekerja migran adalah sasaran dari kebijakan ini.

Karakteristik Agen Pelaksana (badan-badan pelaksana)

Sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja kebijakan tersebut. Hal ini dapat terlihat dari dukungan yang diberikan oleh organisasi formal maupun organisasi informal. Faktor pendorong dari implementasi kebijakan khusus pemulihan ekonomi pekerja migran di Desa Kecamatan Suralaga yaitu dapat ditunjukkan oleh respon dan pro aktif dalam bekerja sama yang aktif antara kepala desa dengan lembaga-lembaga yang ada di desa meliputi BUMDes, PKK dalam menentukan kebijakan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi pekerja migran di tengah pandemi Covid-19 ini.

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup dukungan lingkungan sosial, ekonomi dan politik untuk suksesnya implementasi kebijakan. Lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak berkaitan dengan implementasi kebijakan ini, masyarakat pekerja migran yang berada di Desa Kecamatan Suralaga merespon baik pelaksanaan program ini.

Disposisi (sikap para pelaksana)

Kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menangani krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 terhadap pemulihan ekonomi pekerja migran tidak sewenang-wenang sehingga dapat meminimalisir terjadinya gejolak di masyarakat. Strategi yang digunakan adalah dengan melibatkan semua stakeholder dalam merumuskan dan mensosialisasikan program kebijakan. Karakteristik lembaga sangat baik ini bisa dilihat dari pembuatan kebijakan khusus dan pembagian bantuan dampak pandemi memberikan perhatiannya juga kepada prekonomian kelompok rentan pekerja migran.

Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Dampak Sosial ekonomi dari Covid19

Sejak Covid 19 terjadi, perekonomian Indonesia terus mengkhawatirkan. Menyikapi wabah virus Covid-19 yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia sendiri lebih memilih langkah *social distance* daripada *lockdown* yang diterapkan di beberapa negara. Mengingat sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia berasal dari bidang atau aktivitas bekerja harian (Pangaribuan 2020). Pilihan kebijakan *social distancing* tentu menjadi pertimbangan pemerintah. *Social distance* adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dirancang untuk menghentikan penyebaran infeksi atau memperlambat penyebaran penyakit Covid-19 ini (Borio 2020; Hamdi 2022; Maulana & Suryaningrum 2021).

Tujuan dari *social distancing* adalah mengurangi kemungkinan kontak antara orang lain yang tidak terinfeksi untuk meminimalisir sebaran penyakit ini. Misalnya seperti, menjaga jarak, dan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah. Melalui peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, pemerintah juga

mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) merupakan kelanjutan dari pembatasan sosial sebelumnya dimana lebih menekankan bahwa semua kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah harus dilaksanakan di rumah. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu langkah penerapan cara yang baru untuk dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam penanganan Covid-19 ini (Pardiyanto 2020; Maulana & Suryaningrum 2021).

Social distancing ini berhasil menekan penyebaran Covid-19 ini namun di sisi lain *social distancing* menyebabkan perekonomian menjadi terhambat. Covi-19 yang terus mewabah semakin meningkatkan kecemasan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kebanyakan orang tidak lagi bekerja atau berdagang. Mereka yang bekerja informal dengan pendapatan harian mengalami penurunan pendapatan (Livana 2020). Hal tersebut berdampak pada kestabilan ekonomi, dalam hal ini pemerintah juga memberikan bantuan pada sektor ekonomi. Pemerintah memiliki berbagai program untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat. Jaring Pengaman Sosial merupakan salah satu program pengurangan risiko sosial pemerintah bagi kelompok rentan, termasuk di masa pandemi Covid-19. Secara garis besar, ada beberapa kebijakan yang dirancang pemerintah sebagai jaring keamanan sosial dalam mengatasi dampak sosial ekonomi dari Covid-19 ini yaitu Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Pra Kerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) regulasi permendes Pemerintah Desa boleh melakukan alokasi anggaran Dana Desa, salah satunya untuk penanganan Covid-19 untuk BLT 40% dari jumlah dana desa, Monitoring dan evaluasi skema BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Namun dalam hal ini tidak ada kriteria khusus bahwa PMI berhak menerima BLT sehingga tidak semua PMI yang terdampak Covid-19 menerima bantuan BLT tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Turmawazi, ketua Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI):

“Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 ini masih secara umum kadang ex buruh migran yang rumahnya bagus dan sering dikirimi ini malah tidak terdata, padahal kategori kemiskinan itu buruh migran itu miskin, kenapa orang pergi karena kemiskinan, karena pekerjaan di dalam negeri tidak menjanjikan”.

Sehingga untuk menyikapi hal tersebut pemerintah Desa Suralaga memasukkan PMI yang terdampak Covid-19 di Suralaga dengan memasukkannya ke dalam kriteria penerima bantuan sosial tunai (BST) seperti yang dipaparkan oleh Sekretaris Desa Paok Lombok Muh. Kencana

“Untuk Covid kemarin ada, bantuan itu dimasukkan ke dalam penerima bantuan sosial (BST). Datanya dimasukkan di dinas sosial. Ada penerima BPMT, tapi itu sudah masuk dalam BPKS. Ini mencakup warga masyarakat yang ekonomi dari menengah ke bawah dan buruh migran masuk ke sana.”

Kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi khususnya PMI yang terdampak Covid-19, upaya tersebut sebagai bentuk perhatian kepada permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Pekerja Migran dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi warga yang tergolong ekonomi menengah ke bawah dan Pekerja Migran.

Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Kelompok Pekerja Migran

Pandemi Covid-19 berdampak ganda (ekonomi dan kesehatan) pada pekerja rentan, ILO mendefinisikan pekerja rentan sebagai pekerja dengan kondisi kehidupan yang tidak menentu, baik dari segi pendapatan, jam kerja, kurangnya jaminan kesehatan maupun jaminan hari tua (Syahrial,2020). Para pekerja rentan ini adalah kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak pandemi Covid-19 ini, karena mereka bergantung pada pendapatan sehari-hari, para pekerja ini terdampak tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi kesehatan. Mereka masih beraktivitas di tengah pandemi yang semakin meluas dan lebih berpotensi terinfeksi virus Covid-19. Salah satunya yaitu pekerja migran, Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian buruh migran di Suralaga; pertama, tertundanya keberangkatan pekerja migran yang sempat dipulangkan dan hendak pergi kembali namun terhalang karena aturan kebijakan *lockdown* dari berbagai negara tujuan dan pemerintah Indonesia pun menutup akses keberangkatan ke luar negeri dengan pemberlakuan kebijakan PSBB (Pardiyanto 2020). Karena hal tersebut membuat pekerja migran yang kesulitan akses untuk berangkat memilih menggunakan jalur ilegal seperti yang dipaparkan H Jalaludin sebagai penyalur TKI dan mantan kepala desa Suralaga:

“Kalo Malaysia timur ndak di lockdown dia jadi lewat Pontianak, jadi pelancong lah dia kalau tidak begitu di mana dia cari pekerjaan apalagi ekonomi kita sedang lumpuh total, namanya juga orang cari uang mengapa kita larang mereka, memang sempat ditutup tapi yang namanya orang mencari uang ada saja jalannya walaupun sedang Covid-19 ini, tapi yang sejak awal-awal itu ndak ada yang berani berangkat tapi sekarang banyak yang sedang berangkat.”

Kedua, di situasi pandemi seperti sekarang ini tidak sedikit masyarakat yang mengambil resiko untuk bermigrasi melalui jalur ilegal untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan banyak dari mereka yang tidak takut terhadap wabah Covid-19. Dalam hal kesehatan pekerja migran cenderung memiliki potensi yang lebih besar untuk tertular virus Covid-19 karena tetap melakukan kegiatan di tengah wabah yang semakin meningkat, karena pekerjaan mereka menuntut untuk berinteraksi dengan banyak orang seperti yang dipaparkan oleh Hamudin sebagai pekerja migran ilegal:

“Kendala kesehatannya tentu ada apalagi menjadi tenaga kerja ilegal, jadi pas kita sakit kita harus urus diri kita sendiri kita tidak bisa berobat ke rumah sakit, jadi hanya diberikan obat saja”

Menjadi PMI memberikan dampak perubahan ekonomi yang baik bagi masyarakat terlebih lagi yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Suralaga yang menjadi PMI, dengan menjadi PMI dapat memperbaiki taraf kesejahteraan hidup ke arah yang lebih baik dari sebelum mereka ke luar negeri, karena hasil kiriman uang dikelola dengan baik seperti yang dipaparkan oleh Humaira, seorang istri dari PMI sekaligus mantan PMI)

“Kalau uang itu, sependai-pandai kita yang jadi bendahara, kita memikirkan masa depan anak jadi waktu membutuhkan uang untuk sekolah itu ada. Kadang-kadang ada yang gadai sawah jadi kita investasikan uang di sana, jadinya kalau orang mau gadai lagi bisa gitu, supaya awet hasil kita uangnya bisa dipakai makan dan kebutuhan lainnya selain bertani saya juga berjualan di sekolah, paginya kita jualan sorenya bertani.”

Saat masa pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menutup akses keberangkatan ke luar negeri dengan pemberlakuan kebijakan PSBB atau dikenal juga dengan istilah *lock down*. Di samping itu, Masyarakat Suralaga memiliki ketergantungan terhadap pekerjaan sebagai PMI. Hal ini mengakibatkan PMI di Suralaga pada masa pandemi Covid-19 memenuhi kebutuhannya dengan cara bertani dikarenakan tinggal di wilayah pedesaan dengan kondisi geografis lahan pertanian kelas satu dengan tingkat kesuburan dan debit air yang memadai, dengan bertani dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun pendapatannya menurun di tengah pandemi Covid-19 ini. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Ibrahim sebagai pekerja migran yang sekarang memilih bertani:

“Alhamdulillah, hasil menjadi buruh migran saya bisa memperbaiki rumah dan membeli tanah, karena memang tujuan utama saya merantau ke Malaysia yaitu ingin dapat rumah yang bagus dan tanah, tanah tersebut saya gunakan untuk menanam sayur jadi saya tetap mengolahnya sehingga uang saya tetap mengalir. Masa pandemi Covid-19 ini semua orang merasakan dampaknya ditambah merosotnya harga komoditas pertanian dampak yang saya rasakan yaitu penjualan sayur saya turun drastis tetapi itu hanya 3 bulan dikarenakan pasar sepi”.

Melihat dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 di atas, menunjukkan bahwa kondisi pekerja migran di Suralaga berbeda-beda. Bagi PMI yang pengelolaan keuangannya tidak baik setelah uang yang dikumpulkan habis mereka harus kembali lagi menjadi pekerja migran meski harus melalui jalur ilegal, bekerja sebagai PMI menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di Suralaga, namun pekerja migran yang terampil dalam pengelolaan keuangannya menginvestasikan kirimannya pada pengelolaan tanah, pertanian, peternakan dengan begitu mereka mampu bertahan di tengah-tengah krisis pandemi Covid-19 ini. Sehingga dengan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa perekonomian PMI di Suralaga pada masa pandemi Covid-19 menurun dan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi yang menimpa pekerja migran Indonesia di Suralaga.

Kebijakan-Kebijakan Khusus Pemerintah terhadap Pemulihan Ekonomi Pekerja Migran

Pandemi Covid-19 telah membawa krisis ekonomi bagi kehidupan masyarakat (Pangaribuan 2020). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 tidak dapat memberikan solusi atas banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok pekerja migran, selama wabah Covid-19, kebijakan tersebut membutuhkan kebijakan yang secara khusus untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh kelompok pekerja migran kebijakan khusus tersebut membutuhkan peran pemerintah desa dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Terdapat beberapa kebijakan khusus masing-masing desa dalam menanggulangi Covid-19 ini terhadap perekonomian buruh migran.

Kebijakan Khusus Desa Suralaga

Desa Suralaga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Suralaga dan merupakan desa induk dari desa-desa yang ada di sekitarnya. Desa Suralaga memiliki luas wilayah sekitar 52.000 Ha yang terbagi dalam 6 Dusun di dalamnya. Jumlah penduduk di Desa Suralaga mencapai 3.532 jiwa dengan 3.532 jiwa laki-laki dan 4.115 jiwa perempuan. Berdasarkan BPS Lombok Timur (2020) jumlah masyarakat Suralaga yang terdata sebagai PMI berjumlah 485 jiwa.

Pemberian Bantuan

Kebijakan pemerintah Desa Suralaga dalam memberikan perhatiannya kepada kelompok buruh migran ialah memfasilitasi dalam penyaluran pemberian bantuan sosial

kepada PMI yang mengalami kecelakaan kerja saat berada di luar negeri seperti yang dipaparkan oleh H Jalal Selaku Mantan Kepala Desa Suralaga:

“Dulu waktu saya menjabat sering datang ke sini dari BP3TKI, Disnaker saya kan dulu juga jadi PJ TKI sering saya dihubungi, pertama dari pusat BNP2TKI, BP3TKI ada program pak haji. Kadang-kadang ada yang cacat habis dari Malaysia di kasi kursi roda, uang sama sama 2.5jt/orang tapi berhubungan dengan Dinas Sosial dia baik provinsi dan kabupaten”.

Pembukaan akses keberangkatan *undocument*

Masyarakat Desa Suralaga rata-rata berprofesi sebagai pekerja migran yang mempunyai penghasilan yang tinggi, Malaysia, Arab Saudi merupakan negara-negara yang banyak dituju oleh pekerja migran dari Suralaga. Karena kebijakan akibat pandemi Covid-19, negara-negara tersebut menunda penerimaan pekerja dari negara lain, dengan penghasilan yang tinggi tersebut hampir digunakan untuk kebutuhan konsumsi, seperti bangun rumah dan lain-lain. Kadang setelah uang mereka habis mereka bingung akan mengerjakan apa karena keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan keuangan (Dewi 2020). Menyikapi hal tersebut, pemerintah Desa Suralaga mendorong masyarakat untuk membuka usaha dengan sebagian pendapatannya. Salah satunya di bidang peternakan. Bsnis ini dianggap sebagai pilihan yang tepat dijalankan oleh orang-orang yang dapat terus bekerja sebagai PMI dan memiliki sumber penghasilan tambahan sambil mengelola modalnya.

Banyak permasalahan yang dihadapi para pekerja migran di Suralaga yang terdampak Covid-19. Pemberlakuan kebijakan pemblokiran akses perjalanan ke luar negeri menjadi kendala bagi pekerja migran untuk kembali bekerja seperti semula. Selain itu, bekerja sebagai pekerja migran merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masih banyak peluang kerja lain yang bisa dikembangkan oleh para pekerja migran. Sebelum pandemi Covid-19, pelatihan dan upaya pemberdayaan perusahaan sering dilakukan, namun pandangan masyarakat terhadap program pengembangan usaha baru sebagai sumber pendapatan tambahan selain menjadi PMI belum dapat diubah. Akibatnya, PMI Suralaga tidak mampu beradaptasi di masa pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan krisis ekonomi, akibat kurangnya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya bekerja sebagai PMI. Melihat persoalan ini, pemerintah Desa Suralaga menyatakan bahwa solusi dari permasalahan yang dihadapi pekerja migran Suralaga adalah dengan mencari akses kerja ke luar negeri. Sehingga dengan hal tersebut, pemerintah desa mengupayakan jalur Ilegal bagi PMI di Suralaga untuk kembali bekerja ke luar negeri. Seperti yang di paparkan oleh H. Jalal:

“Namanya kan kita kerja gini saya sudah merasakan pahit manisnya waktu saya menjabat menjadi kepala desa dulu pernah saya berdebat tentang PJ TKI, saya sampaikan begini bapak kalau Suralaga tidak ada TKI jangan harap Suralaga akan maju lihat rumah orang-orang yang bertingkat di sini itu penghasilan TKI jangan coba-coba mau ditutup apakah anda bisa menggaji orang. Paling beraninya orang Indonesia menggaji orang itu 1.5 juta sedangkan di luar negeri 5 Juta daripada kita jadi dosen capek-capek kuliah gajinya sama.”

Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Desa Suralaga meyakini bahwa bekerja sebagai PMI sangat membantu perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama di masa pandemi Covid 19. Oleh karena itu, hal ini menandakan

bahwa pemerintah desa mengupayakan agar masyarakat dapat masuk secara ilegal untuk tetap bekerja sebagai PMI di luar negeri.

Kebijakan Khusus Desa Paok Lombok

Desa Paok Lombok merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Ada 10 dusun di Desa Paok Lombok, dan sekitar 200 orang bekerja sebagai PMI di setiap dusun, tetapi sebagian besar PMI yang ada tidak tercatat karena mereka bekerja melalui jalur ilegal dalam pekerjaan mereka sebagai PMI. Sedangkan menurut data BPS Lombok Timur (2020), jumlah PMI Paok Lombok hanya 175. Upaya pemerintah dalam meminimalisir keberangkatan melalui jalur ilegal dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan bahaya melalui jalur ilegal serta penguatan dokumen keberangkatan jika hendak menjadi buruh migran seperti yang dipaparkan oleh sekretaris desa paok Lombok M. Kencana:

“Adanya penyuluhan mengurangi buruh migran yang non legal. Jadi yang bentuknya peraturan yang sifatnya legal dari pemerintah desa itu belum ada. Bahkan ini murni dari kabupaten. Tetapi untuk syarat-syarat yang diajukan jika ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, dari desa ada surat izin keluarga yang ditandatangani oleh keluarga, itu termasuk syarat utama untuk izin keluarnya”.

Di balik banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia, Kecamatan Suralaga juga menjadi lahan pertanian kelas satu. Kondisi geografis dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanah dan debit air yang memadai membuat Suralaga menjadi wilayah yang potensial untuk pengembangan pertanian. Sepanjang jalan di Suralaga dapat kita melihat banyaknya lahan pertanian. Pada umumnya sebelum memutuskan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, profesi yang dijalankan masyarakat adalah bertani. Pemerintah Desa Paok Lombok mendorong masyarakatnya, khususnya kelompok PMI di Suralaga, untuk menggunakan hasil pekerjaannya sebagai PMI sebagai modal usaha di sektor pertanian. Pemerintah Desa Paok Lombok meyakini bahwa memulai usaha pertanian dapat menjadi investasi berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi PMI di Suralaga. Pertanian dipandang sebagai sumber pendapatan tambahan bagi mereka yang ingin tetap bekerja sebagai PMI, sehingga masyarakat yang tidak bisa kembali ke PMI, seperti di masa pandemi Covid-19 dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah desa telah menunjukkan bahwa banyak individu yang sebelumnya menjadi PMI telah berhasil menjalankan usahatani, khususnya di sektor sayuran. Suralaga merupakan salah satu pemasok sayuran terbesar di Lombok seperti cabai, tomat, terong dan kacang.

Kebijakan Khusus Desa Dasan Borok

Desa Dasan Borok merupakan salah satu desa pemekaran di Kecamatan Suralaga dengan jumlah penduduk berjumlah 2.600 jiwa, Desa Dasan Borok semenjak tahun 2018 dinobatkan sebagai Desa Migran Produktif (Desmigratif). Berdasarkan data BPS Lombok Timur (2020), jumlah penduduk Dasan Borok yang terdaftar sebagai PMI sebanyak 317 orang. Pemerintah Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga menyadari bahwa mewabahnya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada tengah-tengah masyarakat. Sehingga menyikapi hal tersebut pemerintah desa dasan borok memerlukan kebijakan khusus untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 tersebut khususnya terhadap perekonomian pekerja migran meliputi:

Bantuan pengembangan di sektor pertanian dan peternakan

Pengembangan di sektor pertanian dan peternakan menjadi pilihan utama yang dikembangkan di Desa Dasan Borok karena komoditas ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan masyarakat. Di samping itu, tingginya angka PMI di Dasan Borok menjadi sasaran utama bagi pemerintah desa dalam mengembangkan perekonomian yang dimiliki PMI di Dasan Borok. Sejalan dengan itu, pemerintah Desa Dasan Borok mengupayakan masyarakat untuk mengembangkan pertanian dan peternakan melalui penganggaran dana desa.

Pemerintah Desa Dasan Borok mendukung masyarakat dari pengadaan benih untuk pertanian dan peternakan. Hal tersebut disampaikan oleh Angga Sarimah selaku kepala desa Dasan Borok:

“Kebijakan desa itu memberikan bantuan kepada masyarakat desa itu bibit petani dan peternak. Karena kami melihat potensi-potensi yang ada, sehingga ini adalah salah satu strategi dari sisi anggaran, supaya masyarakat Desa Dasan Borok ini bisa bertahan. Pada tahun ini, masyarakat Dasan Borok menganggarkan lagi peternakan diberikan kepada masyarakat kita khususnya masyarakat tidak mampu dan buruh migran yaitu dalam bentuk bibit ternak kambing sekitar 40 masyarakat yang memang sesuai anggaran yang ada”.

Ketergantungan PMI di Dasan Borok selama ini menjadi permasalahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya pada masa pandemi Covid-19. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Desa Dasan Borok meyakini bahwa dengan memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya terhadap kelompok PMI di Dasan Borok dapat membantu masyarakat untuk mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang disebabkan akibat pandemi Covid-19.

Pengembangan UMKM

Selain pengembangan sektor pertanian, pemerintah Desa Dasan Borok juga melirik usaha masyarakat di bidang UMKM pengolahan hasil pertanian. Pemerintah desa meyakini integrasi produk pertanian berupa komoditas dengan kemampuan masyarakat mengolah komoditas tersebut menjadi pangan merupakan peluang yang dapat dikembangkan menjadi UMKM masyarakat khususnya pekerja migran. Sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab membantu UMKM mencapai tujuan pengembangan usaha UMKM. Jika UMKM memiliki kelemahan di bidang produksi, maka peran fasilitator untuk membekali UMKM dengan berbagai cara, misalnya melalui pelatihan. Begitu pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah mencari cara bagi UMKM untuk mengumpulkan dana yang diperlukan (Anggraeni 2020). Untuk mendukung berdirinya UMKM, pemerintah Desa Dasan Borok mencari dukungan dana dengan mengajukan permohonan anggaran pengembangan UMKM kepada pemerintah pusat. Pemerintah meyakini dana desa tidak hanya ditujukan untuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sebagaimana yang di sampaikan oleh kepala desa Dasan Borok Angga Sarimah:

“Dana desa yang disalurkan pemerintah dari semua desa yang ada sebenarnya bagaimana bisa menghidupkan perekonomian yang ada. Untuk sumber dananya, dana UMKM didapat dari pusat, maka dengan adanya program yang ditawarkan tadi untuk sementara ini diakui ada beberapa yang kita jumpai untuk UMKM dan pembinaanya itu, bisa mengubah mindset”.

Dari pemaparan di atas Pemerintah Desa Dasan Borok menggunakan dana desa sebagai sarana pengembangan ekonomi di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masyarakat. Kelompok-kelompok

UMKM inilah yang mengelola dan mengolah sehingga muncullah produk-produk olahan seperti, jajanan kering jajanan basah, dengan program seperti ini diharapkan mampu untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Dasan Borok untuk kembali menjadi buruh migran setelah ia kembali.

Di antara ketiga desa tersebut bahwa desa Dasan Borok lebih mampu meningkatkan perekonomian pekerja migran di tengah pandemi Covid-19 ini dilihat dari bentuk kebijakan yang dikembangkan bersumber dari hasil analisis atau pembacaan terhadap permasalahan dan potensi yang dimiliki PMI di Suralaga, untuk dijadikan acuan dalam pembuatan program yang akan dikembangkan sebagai upaya merespon dampak dari pandemi Covid-19 dan melalui melalui Kementerian Ketenagakerjaan dijadikan sebagai Desa Dismigratif (Desa Migran Produktif). Dasan Borok dianugrahi sebagai Desa Dimigratif (Desa Migran Produktif) karena program-programnya yang relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat khususnya kelompok pekerja migran.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Dampak yang muncul akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis sosial ekonomi khususnya pekerja migran di Suralaga. Kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah desa Suralaga untuk menangani Covid-19 seperti kebijakan *social distancing*, PSBB, PPKM hingga pembentukan jaring pengaman sosial dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Pra Kerja. Pekerja migran Indonesia di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu kelompok yang merasakan dampak akibat pandemi Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa belum bisa menjadi solusi atas permasalahan krisis ekonomi yang dirasakan PMI di Suralaga, sehingga hal ini mendorong pemerintah desa di Kecamatan Suralaga mengeluarkan kebijakan khusus untuk meminimalisir dampak Covid-19 ini, seperti Bantuan Sosial, pengembangan usaha pada sektor pertanian, peternakan, pengembangan UMKM, hingga memberikan akses menjadi PMI ilegal. Kebijakan khusus yang diterapkan bersumber dari hasil analisis atau peninjauan terhadap permasalahan dan potensi yang dimiliki PMI di Suralaga, untuk dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan yang diimplementasikan sebagai upaya merespon dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

REKOMENDASI

Kebijakan khusus yang diimplementasikan pemerintah desa di Kecamatan Suralaga harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, kebijakan khusus ini harus terus dijalankan agar menjadi program yang berkelanjutan, perlu adanya peran pemerintah pemerintah pusat, pemerintah desa dan stakeholder yang terkait sebagai fasilitator dalam memberikan bantuan fasilitas atau anggaran agar program ini berjalan dengan maksimal dan penggunaan dana desa ini jangan hanya digunakan untuk pembangunan fisik saja tapi adanya pemberdayaan peningkatan ekonomi. Jika fasilitas dan anggaran telah memadai maka program yang dikembangkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Suralaga Lombok Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya dan tim mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbud yang telah mendanai penelitian ini dalam skema riset MBKM tahun 2021-2022 yang melibatkan mahasiswa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yang telah membantu kelancaran riset ini termasuk para tokoh masyarakat di kecamatan Suralaga khususnya di Desa Suralaga, Desa Paok Lombok, dan Desa Dasan Borok, PMI, Penyalur PMI di Suralaga, Aktivistis Pemerhati PMI dan LSM pendamping PMI, dan seluruh stakeholders terkait atas partisipasi dan kerjasamanya, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, C., Wulan P., N., and Alimah, M.N. 2021. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Journal of Government and Politics (JGOP)* Vol. 3 (No 1): 47-65.
- Artayasa, 2021. "Kebijakan Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Dampak Covid-19 di Kota Denpasar." *Jurnal Cakrawarti* Vol. 03 (No. 02): 34-39.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2020. "Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia." Diakses tanggal 9 Maret 2022. <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-agustus-tahun-2021>
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2021. "Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia." Diakses tanggal 11 Maret 2022. <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun2021>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. 2020. "Kecamatan Suralaga dalam Angka 2020." Diakses Tanggal 9 Maret 2022. <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-agustus-tahun-2020>.
- Bodrud-Doza, M., Shammi, M., Bahlman, L., Islam, A. R. M., & Rahman, M. (2020). "Psychosocial and Socio-economic Crisis in Bangladesh due to Covid-19 Pandemic: a Perception-Based Assessment." *Frontiers in public health*, 341.
- Borio, C. (2020). "The Covid-19 Economic Crisis: Dangerously Unique". *Business Economics*, Vol. 55(4): 181-190.
- Fahrudin. (2020). "Kebijakan Desa Dukuhdempok Dalam Melindungi Buruh Migran Dan Pemberdayaan Mantan Buruh Migran (Studi Pada Peraturan Desa Dukuh Dempok Nomor 01 2017)". Skripsi Universitas Muhammadiyah (UM) Jember.
- Harian Radar Lombok. 2020. "NTB Tempati Posisi Keempat Penyuplai TKI." Diakses 10 Maret 2021. <https://radarlombok.co.id/ntb-tempati-posisi-keem>.
- Hamdi, Saipul. 2022. "Covid-19, Social Stigma and Changing Religious Practice in Tablighi Jamaat Communities in Lombok, Indonesia." *International Journal of Disaster Risk Reduction*. Vol. 76: 102996. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.102996>.
- Husin, Taqwaddin. 2020. "Bantuan Langsung Tunai dari Dasan Desa." Diakses 1 April 2022. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsung-tunai-dari-dana-desa>
- Iqrom P., Patmil W.W., Hisbullah, Aditya, Hartika. 2021. "Peran Pemerintah Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Dasan baru Kopang Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* Vol. 4 (No 4): 88-92.
- Jalaludin & Suriadi, Irwan. 2019. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Buruh Migran (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5 (No 1): 2654-8712.

- Juaningsih, N.I., Consuello Y., Tarmidzi A., NurIrfan D. 2021. "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia." *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 7 (No 6): 509-518.
- Livana., Suwoso, R., H., Febrianto, T., Kushindarto, D., Aziz, F. (2021). "Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa." *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* Vol. 1 (No 1): 37 - 48
- Maulana, Arif, Suryaningrum, Nugrahayu. 2021. "Sektor Potensial Pembangkit Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Selama Pandemi Covid-19". *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Vol. 16 (No 2): 127-13.
- Maritz, A.; Perenyi, A.; de Waal, G.; Buck, C. 2020. "Entrepreneurship as the Unsung Hero during the Current Covid-19" Economic Crisis: Australian Perspectives." *Sustainability* 12:4612. <https://doi.org/10.3390/su12114612>
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pangaribuan, M, T., Munandar, I, A. 2021. "Kebijakan Pemerintah Dki Jakarta Menangani Pandemi Covid-19." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 14 (No 1): 1-9
- Pardiyanto, A, M., 2020. "Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Wabah Covid-19." *SPEKTRUM* Vol. 17 (No 2): 1829–6580.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." Diakses tanggal 15 April 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64508/uu-no-18-tahun2017>.
- Qawiyurrijal N, Zainul, M, Kurniawati, M, F. 2020. "Pekerja Migran Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Bingkai Media Daring (Analisis Framing Model Robert N. Entman Pada Portal Berita Bbc News Indonesia)." <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/4574/>
- Ruhyana, N, F., Ferdiansyah H. 2020. "Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Khazanah Intelektual* Volume 4 (No. 2): 789-804.
- Suartina T. 2013. "Problematika Konsep, Kebijakan Dan Kelembagaan: Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan Jawa Timur." *Jurnal Masyarakat & Budaya* Vol. 15 (No 1): 21-48
- Syahrial. (2020). "Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia." *Jurnal Ners* Vol. 4 (No 2): 21-29.